**BAB II**

**HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA**

**BIDANG EKSPOR IMPOR DAGING SAPI**

1. **Negara dan Hubungan Internasional**
2. **Pembentukan Negara**

Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena memiliki kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh diri sendiri. Berdasarkan teori *zoon politicon* menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Teori ini merupakan suatu pandangan atau asumsi dari Aristoteles bahwa “Manusia itu tidak bisa lepas dari masyarakat, ia tidak bisa melepaskan diri dari masyarakatnya karena ia memiliki ketergantungan terhadap kelompoknya.[[1]](#footnote-1) Dalam hal ini manusia mempunyai tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jika manusia berusaha dengan masing-masing kepentingan berbeda, maka diperlukan hukum dalam semua norma apabila sudah tidak dapat lagi mengaturnya. Hal tersebut sesuai dengan *teori residu (teori sisa)* bahwa “Norma hukum yang mengatur keadilan bila semua norma sudah tidak dapat lagi mengatur”.[[2]](#footnote-2)

Sejalan dengan hal tersebut maka terlihat dengan jelas bahwa diantara manusia saling berkaitan kepentingan dan saling mempengaruhi, baik dalam norma agama, norma asusila, norma sopan-santun manusia maupun dalam segi lainnya yang saling mempengaruhi. Kemudian dalam bidang hukum akan saling mengikat antar individu dalam masyarakat, karena satu sama lain tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Sementara manusia telah memiliki sifat untuk melakukan tindakan yang benar dan salah, sehingga akan memerlukan pengaturan dalam menjalankan hidup dan kehidupannya.

Kewajiban tertinggi manusia sebagai warga negara yaitu adalah menjadi warga Negara sesuai Undang-undang sebagai dasar pengaturan. Kendati demikian, pengaturan warga negara tersebut tidak selamanya tertulis, karena diantaranya masih ada peraturan yang bersifat natural atau disebut dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat. Kehidupan manusia akan selalu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak tak terbatas, sehingga tidak akan pernah ada kepuasan yang dapat dicapai secara mutlak. “Pemenuhan kebutuhan dan keinginan yang telah tercapai akan meningkat untuk berkeinginan menguasai”.[[3]](#footnote-3) Manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya akan memiliki keinginan yang lebih besar yaitu berkeinginan menguasai suatu wilayah besar dan membentuk menjadi suatu negara. Pembentukan suatu negara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia dalam menguasi wilayah tertentu, maka suatu negara akan mempuyai unsur-unsur sebagai berikut:[[4]](#footnote-4)

*“1. A permanent population*

 *2. A defined teritory*

 *3. A government; and*

 *4. A capacity to enter into relations with other states”*

Agar mengerti dan memahami mengenai unsur-unsur Negara tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *A permanent population* atau penduduk asli yaitu unsur pertama yang penting bagi suatu Negara adalah penduduk dan kekuasaan Negara harus mampu menjangkau semua penduduk diwilayahnya. Penduduk dalam suatu Negara akan menunjukkan beberapa ciri khusus yang membedakan dari bangsa lainnya. Perbedaan tersebut akan nampak dari segi kebudayaan, nilai politik, dan identitas nasionalis. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya, bahasa, kebudayaan, suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang dapat mendorong kearah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat.[[5]](#footnote-5)
2. *A defined territory* atau batas wilayah yaitu “wilayah tertentu (*a defined territory*) ialah batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. “Setiap Negara harus memiliki wilayah atau teritorial yang tampak nyata dengan batas-batas yang dapat dikenal baik dalam arti faktual maupun yuridis”.[[6]](#footnote-6) Faktual mengandung arti kenyataan bahwa Negara yang berangkutan menguasai dan menjalankan kekuasaan wilayahnya. Kemudian yang dimaksud dengan yuridis yaitu memiliki kepastian hukum mengenai batas wilayah tersebut dan diakui secara internasional. Faktual dan yuridis tersebut sangat penting dimiliki suatu Negara, karena tidak menutup kemungkinan suatu negara faktur tetapi tidak yuridis atau sebaliknya. Secara faktual yaitu wilayah yang diduduki secara paksa, tetapi karena Negara tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam mengusai wilayah tersebut.
3. *A government* atau pemerintahan yang berdaulat yaitu untuk mencapai tujuan Negara dibutuhkan proses kerja secara operasional. Penyelenggara pencapaian tujuan Negara tersebut adalah pemerintahan, sehingga pemerintahan dalam suatu negara harus memiliki kepastian hukum dan kewenangannya. “Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya.”[[7]](#footnote-7) Pemerintah dalam suatu Negara merupakan pemerintahan yang mencakup seluruh Badan-badan Negara. Pemerintah yang berkuasa harus diakui warga masyarakat negara tersebut, karena pemerintah merupakan pembawa dan pelaksana untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintah harus berkondisi stabil untuk memberikan pelayanan kepada warga masyarakat pada negaranya.
4. *A capacity to enter into relations with other states* atau kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan Negara lain. Setiap Negara tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa disertai hubungan dengan negara lain. Pengakuan suatu negara merupakan awal yang sangat penting, karena suatu negara yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, tidak mungkin dapat berjalan dengan stabil. “Apabila semua unsur-unsur negara telah dimiliki oleh suatu masyarakat politik, maka dengan sendirinya ia telah merupakan sebuah negara dan harus diperlakukan secara demikian oleh negara-negara lainnya”. Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa setiap negara yang telah memenuhi syarat suatu negara, maka terlebih dahulu harus mendapat pengakuan.

Negara menurut pendapat para ahli, “Negara dapat diartikan sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama.[[8]](#footnote-8) Suatu negara jika memenuhi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Rakyat, yaitu semua orang yang berada di dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam wilayah suatu negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara.

2. Wilayah, Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan kedaulatannya.

3. Pemerintah yang berdaulat, Pemerintah dalam arti luas adalah gabungan dari semua lembaga kenegaraan atau gabungan dari semua alat perlengkapan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif. Pengakuan dari negara lain, ada dua macam, yaitu:

* 1. Pengakuan *defacto,* yaitu pengakuan terhadap suatu negara berdasarkan kenyataan adanya negara.
	2. Pengakuan *dejure,* yaitu pengakuan terhadap sahnya suatu negara berdasarkan pertimbangan menurut hukum”.

Pembentukan suatu negara meliputi beberapa teori yang digunakan, karena dalam pembentukan negara harus memiliki pertimbangan kepastian dan kejelasan dasar hukum yang digunakan. Teori yang dapat digunakan dalam pembentukan Negara meliputi teori “*Social contract* (teori perjanjian masyarakat), *The Godhead* (ketuhanan), *Forcesly* (kekuaatan), dan organis, *Historicaly* (sejarah), *the Rule of law* (kedaulatan hukum), dan *Nature of law* (alam)”.[[10]](#footnote-10)

Setiap negara akan memiliki bentuk yang berbeda-beda, baik karena latar belakang pembentukan maupun keinginan masyarakat ketika Negara tersebut dibentuk. Penentuan bentuk Negara tersebut ditetapkan dalam dasar hukum negara tersebut. Konsep dan teori modern mengenai ketatanegaraan, maka negara terbagi dalam dua bentuk yaitu bentuk “Negara Kesatuan dan Negara Serikat”[[11]](#footnote-11) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bentuk lain dari kedua Negara tersebut, ditinjau dari segi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, maka bentuk negara dapat digolongkan kedalam tiga kelompok yaitu Monarki, Oligarki, dan Demokrasi:[[12]](#footnote-12) Bentuk negara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Setiap negara yang dibentuk akan selalu mempunyai tujuan tertentu sesuai latar belakang pembentukan negara tersebut.Tujuan negara harus memiliki kepastian, ketegasan, dan kejelasan, karena akan menjadi arah dalam proses pencapaiannya secara secara operasional. “Tujuan negara dalam hal ini dapat pula diartikan sebagai visi negara, yang secara umum ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi rakyatnya”.[[13]](#footnote-13)

Menurut Abu Daud Busroh “Tujuan negara ialah negara itu sendiri, negara adalah identitas yang mempunyai kemampuan sendiri dalam mengejar pelaksanaan ide umum, ia memelihara dan menyempurnakan diri sendiri, maka kewajiban tertinggi dari manusia sebagai warga negara adalah dengan menjadi warga negara yang patuh pada Undang-undang.[[14]](#footnote-14) Dalam hal ini “Tujuan Negara adalah dihubungkan dengan cita-cita manusia hidup di alam kekal dan menghubungkan tujuan negara dengan mencari kekuasaan semata, sehingga Negara itu identik dengan penguasa.”[[15]](#footnote-15) Pekermbangan dalam pengusahaan suatu negara harus didukung dengan kerjasama yang harmonis diantara negara yang satu sama lain memiliki kepentingan tertentu, karena setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tanpa disertai bantuan negara lain. Hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya sering disebut dengan hubungan bilateral.

1. **Hubungan Internasional**

Pembentukan suatu negara bertujuan untuk menjamin agar hidup dan kehidupan bangsanya sejahtera. Namun kenyataan membuktikan bahwa untuk menjamin kehidupan bangsa yang sejahtera dalam suatu negara, tidak selamanya negara mampu mensejahterakan bangsanya tanpa disertai hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional merupakan aspek penting dalam menjembatani tujuan pencapaian target bangsa yang sejahtera.

Hubungan internasional merupakan istilah yang telah berkembang cukup pesat pada akhir abad ke-19. Sejumlah pakar hubungan internasional telah banyak memberikan definisi secara garis besar bahwa hubungan internasional merupakan hubungan yang terjalin antar negara diseluruh belahan dunia. Definisi hubungan internasional sangat tergantung dari referensi, pengalaman, disiplin ilmu, serta konsentrasi aktor yang mendefinisikan. McClelland mendefinisikan hubungan internasional yaitu “*International relations is the study of the interaction between certain types of social, including the relevant circumstances surrounding the interaction*.”[[16]](#footnote-16)Definisi tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang perlu diperhatikan dalam setiap hubungan internasional yaitu:[[17]](#footnote-17)

1. *Any behavior is influenced by the interaction they experienced in the past and that interaction is a behavior resource.*

*2. Experience interaction in the past, so that the perpetrators can predict what will happen and each one can act with such estimates*.

Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antar jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

1. Setiap perilaku dipengaruhi oleh interaksi yang dialaminya di masa lalu dan bahwa interaksi adalah sumber daya perilaku.
2. Pengalaman interaksi di masa lalu, sehingga pelaku dapat memperkirakan apa yang akan terjadi dan masing-masing dapat bertindak dengan perkiraan tersebut.

Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Steve Chan yaitu:[[18]](#footnote-18) “*International relations is the interaction of actors whose actions and conditions have important consequences for the other actors outside the jurisdiction of effective political unit*.” Hubungan Internasional adalah interaksi aktor-aktor yang tindakan dan kondisinya memiliki konsekuensi penting terhadap aktor lain di luar yurisdiksi efektif unit politiknya.” Negara-negara dapat dipandang sebagai pelaku utama dari hubungan internasional. Hal tersebut dikarenakan yang melakukan tindakan dan dampak dari tindakan tersebut adalah unit politik walaupun tidak tertutup kemungkinan yang melakukan tindakan tersebut aktor-aktor non-negara.

Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat luas dan hanya dapat dilakukan oleh negara yang memiliki kemampuan tersendiri sebagaimana dikemukakan Sihombing sebagai berikut:[[19]](#footnote-19)

Hubungan internasional adalah mencakup hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda dan berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok, maupun secara perorangan resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain, yang melintasi batas-batas teritorial suatu negara.

Hubungan internasional akan melibatkan sejumlah ilmu lain yang berkaitan dengan kepentingan dalam hubungan tersebut sebagaimana dikemukakan Steiner yang menyatakan sebagai berikut:[[20]](#footnote-20)

*In international relations itself there are components that affect the work of international relations itself that the analysis of comparative foreign policy of a country, international law, international organizations, comparative politics and area studies, strategic studies, international development, international communication and peace studies and conflict resolution efforts including those on control and disarmament.*

Hubungan internasional merupakan bentuk hubungan yang sangat luas, sebagaimana pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam hubungan internasional sendiri terdapat komponen yang mempengaruhi kerja dari hubungan internasional sendiri yakni adanya analisis mengenai perbandingan politik luar negeri suatu negara, hukum internasional, organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan *(Area studies)*, studi strategis *(strategis studies),* pembangunan internasional, komunikasi internasional, studi perdamaian serta upaya penyelesaian konflik termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa hubungan internasional kontemporer bukan hanya mempelajari hubungan politik antar negara-negara, melainkan hubungan dengan sekelompok subjek lain yaitu dengan interdependensi ekonomi, hak asasi manusia, perusahaan transnasional, organisasi internasional, lingkungan hidup, gender, keterbelakangan dan seterusnya.[[21]](#footnote-21) Sejalan dengan hal tersebut maka K. J. Holsti mendefinisikan hubungan internasional yaitu[[22]](#footnote-22) “Hubungan internasional adalah segala bentuk interaksi, diantara masyarakat, Negara-negara, baik yang dilakukan Negara maupun warga Negara yang terjadi dengan melintasi batas-batas geografis Negara.”

Metode popular yang digunakan untuk menganalisis kecenderungan hubungan internasional kontemporer adalah dengan melihat pola hubungan yang mengindikasikan ada kesinambungan dan perubahan (*Continuity and Change*) dalam bebagai segi hubungan internasional, seperti yang dinyatakan Toma dan Gorman sebagai berikut:[[23]](#footnote-23)

Faktor pendukung utama untuk kesinambungan (*Continuity*) Hubungan Internasional adalah aktor negara-bangsa, yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk meraih kepentingan nasional, berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam hubungan Internasional. Sedangkan pendukung perubahan (*Change*) adalah globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, ancaman terhadap lingkungan hidup, peningkatan *power* dan *influence* dari actor non-negara.

Peristiwa hubungan internasional itu terjadi disebabkan oleh berbagai bentuk kepenting diantara negara. Kepentingan tersebut sangat banyak ragamnya, baik kepentingan pendidikan, kesehatan, keamanan, politik, kebudayaan, maupun kepentingan lainnya yang berkaitan dengan upaya untuk menjamin agar negara yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari gerak langkah hubungan internasional tersebut.

1. **Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (James dan Robert,1986:419). Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Sehingga memunculkan kepentingan yang beraneka ragam yang mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang diakibatkan tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama untuk mencari solusinya. Perkembangan didalam Politik luar negeri dimana terdapat berbagai pola yang salah satunya, ialah pola kerjasama yang akan menjelaskan kearah mana suatu negara melangkah apakah kearah kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya, atau kepada pertahanan dan keamanan ( Dougherty dan Pfaltzgraff, 1997: 418).

Menurut ilmu Hubungan Internasional berdasarkan Charles. A. McCleland dalam bukunya mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan alat internasional yang berfungsi untuk memberikan fasilitas-fasilitas dan untuk melayani kegiatan-kegiatan yang hampir tidak ada batasnya adalah terdapat dalam suatu kerjasama internasional, misalnya dalam kerjasama internasional tentang ilmu pengetahuan, kekuasaan perusahaan internasional. Kerjasama dalam pengumpulan dan penyebaran berita dunia, dalam komunikasi internasional antara gereja, profesi, serikat-serikat kerja dan badan-badan pemerintah dalam mengejar lain-lain kegiatan yang terorganisir. Apabila suatu negara memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi tertentu, menurut Peter Toma dan Robert Gorman,diantaranya:

1. Motivasi untuk memperkuat kepentingan nasional, dimana kerjasama di pandang oleh suatu negara merupakan suatu alat untuk memperkuat kepentingan nasionalnya.

2. Motivasi untuk memelihara perdamaian, suatu kerjasama diharapkan dapat memberikan jalan untuk menghindari konflik dan menghalangi terjadinya perang diantara negara-negara yang bertikai.

3. Motivasi untuk mendorong kemakmuran ekonomi, dimana sebuah kerjasama diharapkan mampu mendorong tingkat kemakmuran ekonomi yang menjadi keinginan setiap negara.

4. Motivasi untuk menangani eksternalitas, kerjasama yang diharapkan mampu menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, seperti menipisnya sumber daya alam serta terorisme (Toma dan Gorman 1991:385-386).

Selain itu kerjasama internasional dapat didefinisikan menjadi empat bagian, yaitu pertama, merupakan suatu proses dimana antara negara-negara yang berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan satu sama lainnya; kedua, mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut; ketiga, mencari kenyataan-kenyataan teknis yang mendukung jalan keluar tertentu; ke empat, mengadakan perundingan atau perjanjian diantara kedua belah pihak (Gilpin, 1997:33). Dalam kerjasama internasional, bentuk dari kerjasama ini dapat diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang kerjasama yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh individu, kelompok, dan negara, diantaranya:

1. Kerjasama Universal (Global), hakekat dari kerjasama ini untuk memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari integrasi internasional, seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Eropa;

2. Kerjasama Regional, bentuk kerjasama antara negara yang berdekatan secara geografis, kesamaan pandangan politik dan kebudayaan, serta perbedaan struktur produktivitas untuk saling membutuhkan, seperti ARF (ASEAN Regional Forum);

3. Kerjasama Fungsional, bentuk kerjasama yang diasumsikan sebagai saling mendukung fungsi dan tujuan bersama, kerjasama yang fungsional bertolak dari cara berpikir yang pragmatis yang mengisyaratkan kemampuan tertentu pada masing-masing mitra kerjasama, seperti NPT (non poliferation treaty);

4. Kerjasama Ideologis, bentuk kerjasama yang dilatar belakangi kesamaan ideologis, diantara para pelaku kerjasama tersebut, seperti pada perang dingin, Pakta Warsawa (Gilpin, 1995:589).

1. **Kerjasama Antar Negara**

Dinamika kehidupan negara akan sangat ditentukan oleh kesinambungan dalam hubungan kerjasama untuk bidang tertentu yang sesuai kebutuhan atau kepentingan negara tersebut. Pemenuhan kebutuhan dari negara lain melalui kerja sama dapat dilakukan dengan cara hubungan bilateral. Sekalipun tidak semua hubungan antar negara merupakan hubungan bilateral. Secara rinci yang dimaksud dengan hubungan bilateral menurut Feldman (2013: 207) yaitu[[24]](#footnote-24) “*Bilaterall relationships can be defined relationship the two countries have an interest in any particular Yag ie between one country to another and different continents. Excluding the bilateral relations if the two countries are related in a certain region or in a regional scope*.” Definisi tersebut menjelaskan bahwa hubungan bilateral dapat didefinisikan hubungan dua negara yag mempunyai kepentingan tertentu yaitu antara satu negara dengan negara yang lain dan berbeda benua. Tidak termasuk hubungan bilateral jika kedua negara yang berhubungan tersebut ada dalam kawasan tertentu atau ada dalam lingkup regional.

Hubungan bilateral merupakan bentuk pertemuan kepentingan internasional yang satu sama lain mengharapkan keuntungan atas hubungan kerjasama tersebut. Hubungan internasional melalui pertemuan internasional akan beraneka ragam kepentingan internasional dan beberapa negara yang sifat kepentingan atau kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuh oleh kemampuan bangsa sendiri. Setelah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mendapatkan kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan (Rudy, 2009: 15). Sejalan dengan definisi di atas, maka hubungan bilateral menurut Rudy (2009: 109) sebagai berikut:[[25]](#footnote-25)

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau di penuhi semua pihak.
2. Persetujuan atas permasalahan tertentu antar dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan benturan kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan negara lain membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan tujuan.
5. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Hubungan bilateral merupakan dinamika kehidupan bernegara yang ikut serta menententukan kemampuan dan keterampilan dalam membangun hubungan dengan negara lain, baik sebagai mitra maupun sebagai pesaing. Hakekat dari hubungan bilateral antar negara adalah untuk kerjasama yang dilakukan setiap negara akan selalu memiliki sifat universal guna membentuk suatu keadaan yang mampu menghindari berbagai permasalahan dan konflik yang bersifat internasional.[[26]](#footnote-26) Bentuk interaksi kerjasama dapat dibedakan berdasarkan pihak yang melakukan hubungan antara negara, seperti kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral. Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak yang terlibat, dan aktor utama hubungan bilateral itu adalah negara.[[27]](#footnote-27) Dalam proses Hubungan bilateral di tentukan tiga motif, yaitu:[[28]](#footnote-28)

1. Memelihara kepentingan nasional yaitu untuk menjamin keutuhan dan perkembangan negara dan bangsa dibutuhkan pemeliharaan kepentingan nasional. Pemeliharaan kepentingan nasional harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan nasional yang hanya dapat dilakukan dengan membuka hubungan dengan negara lain.
2. Memelihara perdamaian sebagai harapan dan keinginan semua bangsa, sehingga dengan membangun hubungan yang harmonis dengan negara lain, maka perdamaian akan terjaga.
3. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi yaitu sangat sulit suatu negara dapat memenuhi kebutuhan yang bernilai ekonomi tanpa batuan negara lain, sehingga hubungan bilateral bidang ekonomi atau perdagangan akan sangat penting dilakukan.

Hubungan bilateral merupakan bentuk hubungan kerjasama antara satu negara dengan negara atau blok negara lain yaitu negara tersebut berada di benua yang berbeda. Misalnya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara Eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dst), Amerika, Vatikan dan lainnya.[[29]](#footnote-29) Hubungan bilateral tersebut diarahkan kepada upaya untuk mewujudkan masyarakat aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Hubungan bilateral tersebut dijalankan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati (*mutually respect*) dan hubungan yang saling menguntungkan (*mutually beneficial relationship*), baik melalui pendekatan secara kelompok maupun bilateral (*group and bilateral approach*).

1. **Hubungan Internasional**

Sumber daya yang di setiap negara akan memiliki kekhasan tersendiri, sehingga sumber daya di setiap negara akan selalu terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Pemenuhan kebutuhan negara terhadap sumber daya tersebut harus dilakukan antara negara yang memiliki sumber daya yang berlebih dengan negara yang kekurangan. Hal tersebut menunjukkan telah timbul hubungan perdagangan antara negara sebagai konsumen dengan negara sebagai produsen. Perdagangan antar negara di dunia disebut dengan perdagangan internasional yang diharapkan dapat saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik negara sebagai produsen maupun konsumen.

Penjualan komoditi tertentu dari suatu negara ke negara lain merupakan wujud dari aktivitas ekspor, sedangkan bagi yang menerima atau membeli barang dari negara lain disebut dengan impor. Hal tersebut telah berlangsung secara terus menerus diantara negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan negara dan mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. Negara-negara di dunia melakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya, ekspor dan impor merupakan bentuk kegiatan perdagangan internasional.

1. **Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional bisa diartikan sebagai kegiatan menjual dan membeli produk yang terjadi antar negara, baik dilakukan antar individu, individu dengan perusahaan, perusahaan dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah. Huala Adolf mendefinisikan perdagangan internasional sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan perusahaan sutau negara, perusahaan dengan pemerintah, [pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah) suatu negara atau pemerintah suatu [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara) dengan pemerintah negara lain.

Perdagangan internasional telah dijadikan faktor penting dalam upaya meningkatkan [Gross Dometic P](http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional)roduct (GDP). Kenyataan membuktikan bahwa sebagian besar negara telah melakukan perdagangan internasional yang berlangsung lama, sebab telah melahirkan keuntungan bagi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik disetiap negara. Hal tersebut terbukti dari perdagangan internasional yang telah ikut serta mendorong  [industrialisasi](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Industrialisasi&action=edit&redlink=1), kemajuan [transportasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi), [globalisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi), serta kehadiran [perusahaan multinasional](http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_multinasional). Perdagangan internasional dilakukan berawal dari langkah dalam pemenuhan kebutuhan setempat yang tidak dapat diproduksi sendiri, maka dilakukan dengan cara barter yaitu pertukaran barang dengan barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Perkembangan selanjutnya, atas dasar kebutuhan yang saling menguntungkan, maka terjadi proses pertukaran dalam skala luas yang sering disebut perdagangan internasional.

Perdagangan internasional tidak terlepas dari sasaran keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak, sehingga kegiatan perdagangan internasional dapat dirasakan telah memberi manfaat bagi negara yang pelakunya. Manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perdagangan internasional menurut Huala Adolf sebagai berikut:[[31]](#footnote-31)

1. Sumber devisa negara
2. Stabilitas harga suatu negara
3. Perluasan lapangan kerja
4. Alih teknologi (pengembangan kawasan industri)
5. Perluasan konsumsi
6. Perolehan barang dan jasa tidak produksi

Perdagangan internasional yang dilakukan oleh setiap negara akan melahirkan manfaat bagi negara yang menjalankannya. Adapun manfaat yang akan diperoleh tersebut sebagai berikut:

1. Sumber devisa yaitu setiap mengekspor (menjual) barang dan jasa, maka negara pelaku akan memperoleh devisa. Devisa yaitu berbagai bentuk benda yang dapat dimanfaatkan untuk alat pembayaran internasional, baik berbentuk mata uang asing, emas, wesel, cek, dan surat-surat berharga lain. Setiap devisa yang diperoleh suatu negara dapat digunakan untuk membayar impor dan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
2. Stabilitas harga dapat dijaga, karena harga barang cenderung akan meningkat jika jumlah barang tersebut tidak terpenuhi permintaan pasar. Untuk menjaga agar harga tidak naik dan berakibat tidak terjangkau konsumen, maka pemerintah melakukan impor barang yang dibutuhkan, sehingga harga akan stabil.
3. Perluasan lapangan kerja dalam menambah kuantitas dan kualitas produksi untuk pemenuhan kebutuhan barang atau jasa yang dibutuhkan. Perdagangan internasional dapat memperluas lapangan kerja, karena peningkatan permintaan luar negeri terhadap hasil produksi barang atau jasa, sehingga akan mendorong pengusaha meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang pada akhirnya akan membutuhkan tenaga kerja.
4. Mendorong alih teknologi yaitu dari tradisional ke modern. Barang impor dari suatu negara yang berteknologi tinggi seperti komputer, kapal selam, pesawat tempur, serta barang elektronik dan mekanik lainnya yang mengharuskan agar masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, serta mampu mengoperasikannya. Kedatangan barang impor tersebut akan memaksa masyarakat untuk memahami dalam pemeliharaan dan perbaikan, sehingga harus mengerti dan memahami mengenai barang impor tersebut. Kondisi demikian akan mendorong alih teknologi dari negara pengekspor ke negara pengimpor.
5. Memperluas konsumsi melalui perdagangan internasional yaitu hasil produksi suatu negara dapat dikonsumsi secara lebih luas oleh sejumlah negara lain. Hasil produksi pertanian dan pengembangan industri, dapat dipasarkan ke seluruh negara di dunia. Semakin memperjaringkan konsumen, maka akan semakin banyak yang membutuhkan dan pada gilirannya produksi akan meningkat dan menyerap tenaga kerja.
6. Tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan memproduksi sendiri. Pemenuhan kebutuhan negara tersebut dapat dengan cara memperoleh barang dan jasa yang tidak mungkin bisa diproduksi sendiri.

Peristiwa perdagangan internasional yang diawali dengan hubungan internasional tersebut, tidak terlepas dari pendukungnya. Menurut Huala Adolf, terdapat sejumlah faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional dapat diuraikan sebagai berikut:[[32]](#footnote-32)

1. Perbedaan sumber alam
2. Perbedaan faktor produksi
3. Perbedaan kondisi ekonomi
4. Kemampuan produksi
5. Keuntungan
6. Persaingan usaha dan bangsa

Berbagai bentuk perbedaan antara negara dengan negara lainnya merupakan latar belakang yang dapat menimbulkan perdagangan internasional. Sekalipun tidak terlepas dari sasaran keuntungan dan persaingan yang samakin ketat dan kompetitif. Faktor yang menjadi perdagangan internasional berlangsung sebagai berikut:

1. Perbedaan sumber alam antara satu negara dengan negara yang lainnya. Setiap negara akan selalu mempunyai kekayaan alam yang berbeda. Hasil pengolahan dari kekayaan alam tersebut dapat dinikmati dalam berbeda cara dan teknisnya. Sumber kekayaan alam yang dimiliki suatu negara akan selalu terbatas, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal tersebut telah mendorong untuk dilakukan tukar-menukar atau perdagangan.
2. Kemampuan negara dalam produksi telah mengakibatkan perbedaan faktor produksi diantara negara. Setiap negara akan selalu mempunyai perbedaan kemampuan tenaga kerja, besararan modal yang dimiliki, serta kemampuan pengusaha dalam memproduksi barang atau jasanya. Kemudian produk yang dihasilkan suatu negara akan mengalami perbedaan, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan terhadap suatu produksi tertentu akan diperlukan perdagangan internasional.
3. Setiap negara akan memiliki kekhasan tersendiri, termasuk kondisi ekonomi yang sangat memungkinkan berbeda. Sejalan dengan perbedaan faktor produksi akan mengakibatkan perbedaan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Suatu negara akan memerlukan biaya tinggi untuk memproduksi barang tertentu sesuai kebutuhannya. Namun berdasarkan perhitungan ekonomis dan finansial, maka akan lebih menguntungkan melakukan impor, sehingga negara tersebut mengimpor barang dari luar negeri karena biayanya dianggap lebih murah.
4. Kemampuan produksi, karena tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Keterbatasan kemampuan suatu negara dalam memproduksi untuk pemenuhan kebutuhannya, baik kekayaan alam maupun dari sumber lain, maka tidak semua barang yang dibutuhkan tersebut mampu untuk diproduksi sendiri, sehingga mendorong untuk pemenuhaan kebutuhan tersbeut melalui tukar-menukar antar bangsa atau dipandang perlu untuk melakukan perdagangan internasional.
5. Berbagai aktivitas suatu negara akan selalu disertai dengan motif keuntungan, termasuk dalam penyelenggaraan perdagangan internasional. Jumlah biaya yang harus tersedia untuk produksi barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan selalu terjadi perbedaan kualitas dan kuantitas. Berdasarkan hasil hitung secara ekonomis, suatu negara akan lebih untung jika melakukan impor dari pada memproduksi sendiri. Sebaliknya tidak menutup kemungkinan lebih menguntungkan jika mempunyai kemampuan untuk memproduksi sendiri barang, karena biaya produksi lebih mudah. Sejalan dengan hal tersdebut, maka suatu negara akan mencari keuntungan dalam memperdagangkan barang atau jasa dari hasil produksinya.
6. Persaingan usaha yang semakin mendesak dan kompetitif, telah mendorong pengusaha untuk melakukan perdagangan antara pengusaha antara negara atau antara pegusaha antar bangsa. Persaingan tersebut akan mendorong untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Peningkatan kualitas produk dari suatu membangkitkan semangat suatu negara untuk mendapatkan produk yang berkualitas, sehingga hasil produksi dengan biaya yang ringan dapat bersaing dalam dunia perdagangan internasional.

Penyelenggaraan perdagangan internasional meliputi beberapa jenis yang tergantung dari kemungkinan dapat dilakukannya. Menurut Huala Adolf, perdagangan internasional tersebut terdiri dari 3 jenis yaitu[[33]](#footnote-33) “Jenis bilateral, regional, dan multilateral. Walaupun sesungguhnya dilatar belakangi oleh faktor sama atau hampir sama.” Jenis perdagangan bilateral yaitu perdagangan yang dilakukan antara dua negara dan mempunyai perbedaan benua. Perdagangan intrenasional jenis ini akan selalu disertai dengan organisasi internasional. Berbeda dengan perdagangan regional yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu, misalnya negara-negara ASEAN. Demikian pula perdagangan multilateral perdagangan yang dilakukan lebih dari dua negara yang tidak terbatas pada kawasan tertentu. Sekalipu demikian, transaksi perdagangan internasional akan selalu disertai dengan diregulasikan melalui perjanjian [bilatera](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bilatera&action=edit&redlink=1)l antara dua negara.

1. **Kerjasama Perdagangan**

Indonesia dengan Australia memiliki hubungan kerjasama perdagangan tidak hanya satu pihak, melainkan satu sama lain melakukan pemenuhan kebutuhan melalui ekspor dan impor. Ekspor merupakan bentuk nyata dari proses transportasi barang atau komoditas dari Indonesia ke Australia secara legal. Hal tersebut bergerak dalam proses perdagangan antara Indonesia ke Australia. Proses ekspor dari Indonesia ke Australia adalah tindakan Indonesia untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri Indonesia untuk memasukannya ke negara Australia. Ekspor barang secara besar akan selalu membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara Indonesia sebagai pengirim dan Australia sebagai penerima. Ekspor merupakan bagian penting dari perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia.

Pelaksanaan ekspor yang diutamakan dari Indonesia ke Australia telah berlangsung sejak tahun 1983. Perjalanan ekspor menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan perubahan strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi sesuatu yang sangat lazim dilakukan. Persaingan yang sangat tajam, tetat, dan kompetitif diantara berbagai produk. Kemudian harga serta kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing setiap produk yang diekspor. Nilai ekspor Indonesia Januari 2012 mencapai US$15,49 miliar atau mengalami penurunan sebesar 9,28% dibanding ekspor Desember 2011. Sementara bila dibanding Januari 2011 mengalami peningkatan sebesar 6,07%. Ekspor nonmigas Januari 2012 mencapai US$12,52 miliar, turun 7,90% dibanding Desember 2011, sedangkan dibanding ekspor Januari 2011 meningkat 4,40%.[[34]](#footnote-34)

Penurunan ekspor nonmigas terbesar Januari 2012 terjadi pada bahan bakar mineral sebesar US$619,3 juta, sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$213,5 juta. Selama periode tersebut, ekspor dari 10 golongan barang memberikan kontribusi besar terhadap total ekspor nonmigas. Kesepuluh golongan tersebut adalah, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet dan barang dari karet, mesin-mesin atau pesawat mekanik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ekspor bijih, kerak, abu logam, kertas atau karton, pakaian jadi bukan rajutan, kayu dan barang dari kayu, serta timah.

Indonesia telah menjadikan Australia sebagai negara sumber impor berbagai komoditi. Maksud dari impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari negara Australia ke negara Indonesia secara legal. Hal tersebut bergerak dalam proses perdagangan internasional antara Indonesia dengan Australia. Proses impor antara Australia dengan Indonesia merupakan tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara Australia ke dalam negara Indonesia. Impor barang komoditas secara besar akan selalu membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara Australia dan negara Indonesia.

Berdasarkan laporan Kementrian Perdagangan RI tahun 2014 mengenai ekspor impor dijelaskan sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Nilai impor Indonesia Januari 2014 sebesar US$14,57 miliar atau turun 11,57% dibanding impor Desember 2013 yang besarnya US$16,48 miliar, sedangkan jika dibanding impor Januari 2013 (US$12,56 miliar) naik 16,02%.
2. Impor nonmigas Januari 2014 sebesar US$11,58 miliar atau turun US$1,25 miliar (9,72%) dibanding impor nonmigas Desember 2013 (US$12,83 miliar). Sebaliknya jika dibanding Januari 2013 (US$9,57 miliar) maka terjadi peningkatan, yaitu sebesar US$1,99 miliar atau 20,80%.
3. Impor migas Januari 2014 sebesar US$2,99 miliar atau turun US$0,66 miliar (18,05%) dibanding impor migas Desember 2013 (US$3,65 miliar), sedangkan jika dibanding impor bulan yang sama tahun sebelumnya (US$2,97 miliar) terjadi peningkatan US$0,02 miliar atau 0,58%.
4. Nilai impor nonmigas terbesar Januari 2014 adalah golongan barang mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US$2,32 miliar. Nilai ini turun 7,81% (US$0,20 miliar) dibanding impor golongan barang yang sama Desember 2013 (US$2,52 miliar). Sementara itu, impor golongan barang tersebut meningkat US$0,60 miliar (34,57%) dibanding impor golongan barang yang sama Januari 2013 (US$1,72 miliar).

Impor daging sapi dari Australia ke Indonesia dari waktu ke waktu secara terus menerus ada peningkatan. Indonesia telah melakukan impor daging sapi dari Australia sejak tahun 1983. Hal ini didorong oleh besarnya jumlah izin impor daging sapi Australia yang diterbitkan untuk pemerintah Indonesia. Secara signifikan, akan terdapat lebih banyak lagi daging sapi dari Australia yang memenuhi kebutuhan Indonesia, karena Pemerintah Indonesia selalu menambah hampir dua kali lipat jumlah izin impor sapi dan daging sapi Australia. Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan, Partogi Pangaribuan[[36]](#footnote-36) mengumumkan bahwa Indonesia tengah meningkatkan jumlah sapi Australia yang biasanya diimpor di kuartal terakhir sehingga mereka dapat menambah simpanan untuk kuartal pertama tahun depan.

Kementerian Perdagangan Indonesia telah menerbitkan izin untuk impor 264.000 ekor sapi sebagai peningkatan yang signifikan dari perkiraan awal sekitar 136.000 ekor. Partogi mengatakan Indonesia perlu menyiapkan "stok penyangga" daging sapi dalam negeri untuk mengantisipasi lonjakan permintaan daging sapi Australia dan ternak dari negara lain. Partogi Pengaribuan telah mengindikasikan bahwa cukup yakin hubungan Indonesia dengan peternak Australia dan posisinya secara geografis membuat Indonesia menjadi pembeli yang lebih diutamakan meskipun ada permintaan yang kuat dari negara-negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.

Indonesia merupakan pasar yang penting bagi Australia,[[37]](#footnote-37) negara Indonesia menerima sebagian besar komoditas ekspor pertanian Australia senilai lebih dari AUD 1 miliar per tahun. Indonesia adalah tujuan utama ekspor hewan hidup (tidak termasuk seafood) dari Australia dengan total AUD 308 juta pada tahun 2013. Daging sapi dan sapi ekspor dari Australia ke Indonesia pada tahun 2014 terdapat peningatan 27% dari tahun ke tahun hingga mencapai 50.000 ton shipped weight.

Impor sapi maupun bakalan dari luar negeri terus meningkat, karena kebutuhan daging sapi dalam negeri belum dapat dipenuhi dengan pasokan sapi lokal. Menurut data pemotongan sapi di Indonesia, populasi sapi selama tiga tahun terakhir naik dari 1.658.000 ekor (tahun 2012) menjadi 1.898.500  ekor (tahun 2013). Namun pertumbuhan populasi sapi potong lokal masih lebih kecil dari pertumbuhan konsumsi daging sapi. Populasi sapi pada sentra peternakan sapi potong seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan pulau Jawa juga lebih kecil dari kebutuhannya. Gejala penurunan populasi sapi dapat ditinjau dari sisi peternak dan sisi pasar. Pada sisi peternak sapi, penurunan populasi disebabkan oleh peningkatan kebutuhan hidup peternak, sehingga sapi betina yang masih produktif sering dipotong dan diperjualbelikan sebagai daging. Penyebab lain adalah bahwa usaha penggemukan tradisional sapi potong oleh masyarakat semakin tidak menarik/menguntungkan dibanding dengan penggemukan. Usaha penggemukan intensif sapi memerlukan modal besar. Hal tersebut menyebabkan ketersediaan bakalan semakin turun.

Ditinjau dari sisi pasar, kebutuhan daging sapi semakin meningkat, baik sebagai akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perubahan pola makan, maupun pertambahan populasi. Kondisi demikian membuat termotivasi untuk meningkatkan perdagangan sapi tanpa peningkatan populasi ternak sapi. Tindakan tersebut secara langsung mempengaruhi hubungan supply-demand daging sapi. Di Indonesia permintaan sapi lokal siap potong lebih tinggi dari ketersediaannya, sehingga pemasok daging sapi termotivasi untuk mengimpor sapi dari Australia. Impor sapi dari Australia bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan peternakan sapi potong, karena disinyalir kualitas daging impor bermutu rendah atau tidak memenuhi kualitas impor.

Perdagangan internasional akan terjadi karena ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antar dua negara yang memiliki kesamaan kebutuhan. Kegiatan perdagangan internasional secara operasional akan selalu melibatkan minimal dua pihak yaitu antara ekspotir dan importir. Pertumbuhan ekonomi negara akan mendorong untuk melakukan ekspor impor dari satu negara ke negara lain, sehingga ekspor impor akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor impor tersebut dapat dilakukan oleh seseorang diantara kedua negara atau perusahan yang berbeda negara. Penjualan suatu produk dari satu negara ke negara lain merupakan bentuk dari aktivitas ekspor impor.

1. **Ekspor**

Target utama dari aktivitas ekspor impor adalah untuk memperoleh keuntungan dari hasil barang yang ekspor tersebut. Perhitungan awal dalam ekspor yaitu perbandingan harga barang yang di ekspor. Jika harga suatu produk lebih tinggi jika dijual ke luar negara dibanding dengan dijual di dalam luar negeri. Jika berdasarkan perhitungan akan lebih menguntungkan, maka akan terjadi perdagangan internasional dalam bentuk ekspor impor. Pelaksanaan ekspor impor dalam suatu negara tidak hanya menguntungkan eksportir dan importir, melainkan termasuk akan menguntungkan negara. Keuntungan negara dari ekspor impor tersebut yaitu pemerintah akan memperoleh pendapatan dalam bentuk devisa yang masuk, sehingga semakin banyak ekspor akan semakin banyak pula devisi yang akan diperoleh negara. Barang atau produk yang dapat diekspor akan sangat banyak ragamnya, sangat tergantung dari negara yang membutuhkan, seperti minyak hasil pertanian dan perkebunan, hasil laut, maupun hasil industri lainnya.

Kelangsungan ekspor impor harus didukung oleh kebijakan pemerintah untuk menjamin agar eksportir dan importir lebih banyak kontibusinya dalam meningkatkan pendapatan negara. Kebijakan yang dibutuhkan bagi eksportir dan importir adalah kemudahan dalam bentuk seperti penyederhanaan prosedur, penghapusan biaya tinggi, pemberian fasilitas, serta penyediaan sarana yang lengkap dan tepat kebutuhan.

Kemampuan penyerapan hasil produksi dan kekuatan pasar dalam permintaan dan penawaran yang disertai dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan pengaruh harga di pasar dunia. Jumlah permintaan produk di pasar dunia lebih besar dibanding dengan jumlah penawaran, maka pada akhirnya akan berpangaruh pada harga menjadi naik. Kondisi demikian merupakan alasan tepat untuk melakukan ekspor.

Dinamika kehidupan ekspor impor akan menuntut kesigapan eksporir untuk memiliki keterampilan khusus dalam menginterpretasi suasana dan peluang pasar. Sikap tanggap dan strategi pemasaran bagi eksportir harus mampu menganalisa pasar internasional, sehingga akan mampu menguasai wilayah pasar internasional secara meluas. Pengembangan ekspor dalam berbagai produk, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspor yaitu nemambah macam produk ekspor, memberikan fasilitas kepada produsen produk ekspor, mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga kestabilan kurs valuta asing, pembuatan perjanjian dagang internasional, peningkatan promosi dagang di luar negeri, serta penyuluhan kepada pelaku ekonomi. Peningkatkan ekspor telah menjadi perhatian khusus dari pemerintah yaitu melalui memberikan penyuluhan kepada pengusaha kecil dan menengah tentang tata cara melakukan ekspor. Banyak produk masyarakat yang diminati pembeli mancanegara, namun karena banyak pengusaha kecil dan menengah tidak mengetahui bagaimana cara mengekspornya maka tidak diekspor produk tersebut. Manfaat yang menjadi target dari ekspor yaitu memperluas pasar bagi produk, menambah devisa negara, memperluas lapangan kerja.Perdagangan antarnegara sangat memungkinkan eksportir untuk menjual barang kepada masyarakat luar negeri. Transaksi tersebut dapat menambah penerimaan devisa negara sehingga, kekayaan negara bertambah karena devisa merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Kegiatan ekspor akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat, karena akan memperluas pasar bagi produk, sehingga kegiatan produksi di dalam negeri akan meningkat dan semakin banyak penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan.

**b. Impor**

Pemenuhan kebutuhan suatu negara dapat dilakukan dengan mendatangkan produk dari negara lain yang sering disebut dengan impor. Aktivitas impor dapat dilakukan perseorangan dari perseorangan, perusahaan dari perusahaan, lembaga dari lembaga maupun kelompok tertentu dari suatu negara tertentu. Importir dalam menjalankan impor akan dilatar belakangi dengan harapan mendapatkan keuntungan, sehingga untuk melaksanakan kegiatan impor selalu diawali dengan analisis pasar secara mendalam, baik pasar dalam maupun luar negeri. Jika hasil analisis pasar membuktikan bahwa harga produk yang dibutuhkan lebih murah di luar negeri, maka dilakukan impor. Alasan utama yang mengakibatkan harga produk lebih murah diluar negeri antara lain negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah, dan negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak.

Kegiatan impor tidak selamanya berdampak positif, tetapi tidak lepas kemungkinan melahirkan dampat negatif terhadap kondisi masyarakat dan perekonomiannya. Negara punya keawajiban untuk menjaga dan memelihara produsen dalam negeri agar tetap terlindungi dari pengaruh negatif. Pembatasan kuota impor merupakan salah satu langkah yang sangat tepat dan paling banyak dilakukan setiap negara. Namun tidak selamanya pembatasan kuota tersebut dilakukan negara importir, karena untuk menaikkan harga produk, maka ekspotir sering melakukan pembatasan kuota secara sepihak. Pembatasan impor akan melahirkan dampak positif bagi suatu negara importir yaitu menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri, mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, serta memperkuat posisi neraca pembayaran. Namun tidak terlepas dari dampak negatif yang dapat merugikan negara importir yaitu jika terjadi peristiwa saling membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka akan berdampak kepada perdagangan internasional menjadi lesu. Lebih lanjut pertumbuhan perekonomian negara importir akan terganggu keberlangsungannya. Kemudian yang penting diperhatikan dari kerugian sebagai dampak negatif impor yaitu produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, sehingga produsen cenderung kurang efisien dalam produksinya. Lebih berbahaya lagi yaitu produsen kurang tantangan untuk meningkatkan mutu produksinya. Kegiatan pembatasan kuota impor yang dilakukan oleh suatu negara dapat mengakibatkan tindakan balasan bagi negara yang merasa dirugikan dari dampak negatif impor.

Sekalipun demikin, impor akan melahirkan sejumlah manfaat yang luar biasa, baik negara importir maupun negara eksportir. Manfaat dari kegiatan impor produk dari luar negeri sebagai berikut:

1. Memperoleh barang dan jasa atau produk yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Setiap negara akan selalu memiliki sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda, baik kualitas maupun kuantitasnya. Perdagangan internasional merupakan jalan keluar yang akan mengatasi pemenuhan kebutuhan negara tidak memiliki sumber daya tertentu. Impor merupakan wujud dari konsep perdagangan antar negara akan yang bisa mendatangkan berbagai produk yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.
2. Alih teknologi modern sangat cepat dan dapat memicu sumber daya manusia untuk menggali dan pengembangan teknologi modern. Proses produksi dapat dipermudah dan dipercepat dengan melalui pemanfaatan teknologi modern. Tingkat teknologi di suatu negara yang masih sederhana, dapat dilakukan pengembangan teknologi masih lambat karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Impor merupakan faktor pendukung kegiatan produksi, karena mengimpor teknologi dari luar negeri. Perdagangan internasional dalam bentuk impor produk, akan terjadi pertukaran informasi mengenai pemeliharaan dan produksi barang yang diimpor, sehingga akan saling bertukar informasi, untuk mempelajari dan memperdalam teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi modern.
3. Bahan baku untuk produksi suatu produk sering menghadapi kesulitan untuk memperolehnya. Kegiatan usaha sudah bisa dipastikan akan membutuhkan bahan baku. Produksi suatu barang akan membutuhkan bahan baku yang layak dan standar. Namun tidak semua negara memiliki bahan baku produksi yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Untuk kelangsungan produksi tersebut, maka pengusaha harus menjaga pasokan bahan baku, salah satu caranya yaitu melalui mengimpor bahan baku dari luar negeri.
1. Sjahran Basah, *Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan,* Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sjahran Basah.*Ibid.*Hlm. 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nimatul Huda. *Ilmu Negar*a. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013. Hlm. 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Idem.*Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-4)
5. Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hlm. 52. [↑](#footnote-ref-5)
6. Bagir Manan. Hukum Kewarganegaraan Menurut UU No. 12 Tahun 2006. Yogyakarta: FH UII Press. 2009. Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ni’matul Huda*. Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013. Hlm. 32. [↑](#footnote-ref-7)
8. I Gde Pantja Astawa, Suprin Na’a. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung. Refika Aditama. 2009. Hlm. 4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sjahran Basah.*Ibid*. Hlm. 10. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Op.Cit.* Hlm. 91. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. Sjahran Basah. Hlm. 20. [↑](#footnote-ref-11)
12. Abu Daud Busroh.*Ilmu Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2006. Hlm 56. [↑](#footnote-ref-12)
13. I Gde Pantja Astawa, Suprin Na’a.*Op.Cit*. Hlm. 45. [↑](#footnote-ref-13)
14. Abu Daud Busroh.*Op.Cit*. Hlm 49. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abu Daud Busroh*. Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013. Hlm. 50. [↑](#footnote-ref-15)
16. Mc. Clelland. Dalam Refika Adhitama, 2003, Hubungan International Contemporer dan Masalah-masalah Global : Isu, Konsep, Teori dan Paradigma, Bandung. 2003. Hal. 124. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid. Hal. 125-126. [↑](#footnote-ref-17)
18. Steve Chan. *International Relations in Perspective: The pursuit of Security.* New Jersey: Prentice Hall. 2004. P 6. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sihombing, L. S. Ilmu Hubungan Internasional. Informasi Internasional dan Praktek Diplomasi. Jakarta: UI Perss. 2012. Hal. 144. [↑](#footnote-ref-19)
20. Steiner, H. Arthur. *Principles and Problems of International Relations.* New York: The Macmillan Company. 2012: P. 627. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ibid. Sihombing, L. S. 2012. Hal. 147. [↑](#footnote-ref-21)
22. K. J. Holsti. Politik Internasional, Kerangka Analisa. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. Seri Terjemahan Abu Hilyah. Ed. II 2007. Hal. 28. [↑](#footnote-ref-22)
23. Toma, Peter A dan Gorman, Robert F. Hubungan Internasional. Pemahaman Isu Global. Seri Terjemahan dari Buku Asli International Relations: Understanding Global Issues, Brooks/cole Publishing, California. 2001. Hal. 168 [↑](#footnote-ref-23)
24. Feldmand, Destienly. Politics *and Change Developbng Countries. The Economics of Ideology*. Cambridge: Cambridge University Press., 2013 P.207. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tengku May Rudy. Konstruksi Hubungan Internasional. Hubungan Bilateral dan Multilateral Bidang IPTEK. Jakarta: Intermedia. 2009. P. 109. [↑](#footnote-ref-25)
26. Perwita, Anak Agung Banyu dan Yani, Yanyan Mochamad. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, Rosda Karya: Bandung. 2005. Hal.22 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibid. Hal. 28 [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. Hal. 29. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ibid. Hal. 37. [↑](#footnote-ref-29)
30. Huala Adolf. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. Hal. 37 [↑](#footnote-ref-30)
31. Ibid. Hal, 44 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid. Hal. 53-54 [↑](#footnote-ref-32)
33. Op. Cit. Huala Adolf. Hal. 79 [↑](#footnote-ref-33)
34. Yanyan Mochamad Yani, Pasang Surut Hubungan Indonesia-Australia,

 http://www.dfat.gov.au/AII/publications/babII/index. html, diakses tanggal 5 Oktober 2015. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kementrian Perdagangan RI. Dinamika dan Perkembangan Ekspor Impor Indonesia-Australia Dalam Hubungan Bilateral.

http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=56&P=Bilateral&l=id Diakses Pada Tanggal 5 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-35)
36. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Hubungan Indonesia – Australia: Menuju Peningkatan Perdagangan yang Komprehensif Melalui Indonesia – Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

<http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_content_id=1091> &detail=true diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 [↑](#footnote-ref-36)
37. Ibid. [↑](#footnote-ref-37)